



Buletin Parlementaria

Nomor 1120/I/IX/2020 • September 2020

DPR Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju



9 772614 339005



5 Parlemen Tak Kehilangan Semangat Kerja di Masa Pandemi Covid-19



16 Komisi IX dan Pemerintah Komitmen Kembangkan Vaksin Covid-19



Foto bersama Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi DPR RI pada Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR RI. Foto: Arief/MAN

DPR Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 DPR RI mengambil tema “DPR Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju”. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan, tema tersebut merupakan tekad dan komitmen bersama dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI, yang akan diarahkan untuk memenuhi harapan rakyat, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan unggul di berbagai bidang.

Dalam memperkuat upaya kemajuan di Indonesia, kata Puan, maka diperlukan suatu kekuatan nasional, yang harus dibangun bersama, melalui kerja bersama. Seluruh komponen bangsa dan seluruh anak bangsa, bergotong royong dengan satu derap langkah yang sama, dalam mengkonsolidasikan seluruh potensi dan sumber daya yang kita miliki untuk dipergunakan dalam membangun kekuatan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan religi.

“DPR RI memiliki tekad dan komitmen

yang tinggi melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, untuk dapat membangun kekuatan nasional bersama rakyat yang dapat mempercepat capaian Indonesia maju,” kata Puan saat menyampaikan pidato laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka ulang tahun ke-75 DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Sejak dilantik, DPR RI periode 2019-2024 telah melakukan 5 masa persidangan. Persidangan DPR RI, sejak Maret 2020, telah dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19. “Namun, hal tersebut tidak mengurangi tekad dan komitmen seluruh Anggota DPR RI untuk melaksanakan fungsi dan tugas konstitusionalnya. DPR RI tetap dapat menjalankan berbagai kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan,” yakin politisi PDI-Perjuangan itu.

DPR RI, masih kata Puan, dalam menjalankan fungsi legislasi, telah menetapkan 248 Rancangan Undang-

Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024, dan 37 RUU Prioritas Tahun 2020 sebagai Prioritas RUU hasil penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19. Perkembangan fungsi legislasi tersebut, kata Puan, yakni 6 RUU telah selesai pembahasan dan telah disahkan menjadi UU, 10 RUU sedang dalam Pembicaraan Tingkat I, dan 19 RUU sedang dalam tahap penyusunan.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI tidak berdiri sendiri, namun dibahas DPR RI dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Oleh karena itu, kinerja legislasi, merupakan kerja bersama DPR RI dan Presiden. “Menjadi komitmen DPR RI dalam setiap pembahasan RUU untuk membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam memberikan aspirasi, kritik, dan masukan, agar kualitas produk legislasi memiliki legitimasi yang kuat,” komitmen Puan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan dalam rangka

pelaksanaan fungsi pengawasan dalam bentuk kegiatan pertemuan fisik dibatasi. “Pengawasan dalam penanganan pandemi Covid-19 juga menjadi perhatian khusus di setiap komisi, bahkan komisi-komisi di DPR menindaklanjuti pengawasan penanganan pandemi Covid-19 dengan membentuk panja pengawasan. Saat ini, DPR memiliki 9 tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR jelas Puan lebih lanjut.

Sementara dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI telah menyelesaikan penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021. Pada APBN 2021, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal, “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”, dengan rancangan kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mendorong reformasi struktural, mempercepat transformasi ekonomi digital, serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Dengan asumsi makro yang diproyeksikan oleh Pemerintah, maka RAPBN tahun 2021 akan berisikan pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun, belanja negara sebesar Rp 2.747,5 triliun, serta defisit anggaran diperkirakan Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB. “Dalam menghadapi situasi ketidakpastian yang bersumber dari pandemi Covid-19, maka diperlukan antisipasi fiskal dalam proyeksi pendapatan negara, penajaman belanja negara, dan pembiayaan defisit,” kata

legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Puan memastikan, DPR RI akan mencermati upaya Pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan utang yang memperhatikan risiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang. Dengan beban utang yang semakin besar, maka Pemerintah wajib memastikan bahwa belanja negara benar-benar efektif dan berkualitas.

Oleh karena itu, melalui fungsi anggaran, DPR RI perlu terus mempertajam kualitas belanja negara di dalam APBN, agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan. “DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, untuk bersama Pemerintah membahas dan memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas, sebagai APBN yang mensejahterahkan rakyat, memajukan Indonesia dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia,” komitmen Puan.

Dalam kesempatan ini, usai Puan dengan didampingi Pimpinan DPR RI lainnya juga menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 kepada para Pimpinan Fraksi DPR RI. Rapat Paripurna ini juga dihadiri Ketua DPR RI pada periode sebelumnya secara virtual. ■ sf



Pimpinan DPR RI. Foto: Gerald/IAN



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kabag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikorn, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Pumtho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indrianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moerpoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyanti

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.A.P, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Paripurna DPR RI Setujui RUU MK Menjadi Undang-Undang

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini akan mengatur kedudukan susunan dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi dan perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK.

Saat memimpin rapat, Dasco meminta persetujuan kepada para Anggota Dewan. “Apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat disetujui untuk disahkan mejadi undang-undang?” tanya Pimpinan Rapat, serentak dijawab ‘Setuju’ oleh para Anggota Dewan yang hadir baik secara fisik maupun virtual di ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9)

Melalui forum Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan Dewan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Keuangan RI atas segala peran, serta kerja sama yang diberikan pada pembahasan RUU tersebut.

“Perkenankan kami juga atas nama Pimpinan Dewan, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar,” papar Dasco dari meja Pimpinan DPR RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU MK Adies Kadir melaporkan, Panja



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri) saat meminta persetujuan kepada para Anggota Dewan atas RUU Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan. Foto: Runi/MAN

telah melakukan perumusan dan sinkronisasi pada seluruh materi RUU MK. Panja juga telah membahas dan menyempurnakan substansi terhadap undang-undang sebelumnya. Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menjabarkan tentang poin-poin perubahan seperti usia dan tata cara seleksi hakim.

“Perubahan mengenai usia minimal, syarat dan tata cara seleksi hakim, penambahan ketentuan baru mengenai unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan penjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional,” papar Adies dalam laporannya.

Dia juga melaporkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disampaikan oleh Pemerintah berjumlah 121 DIM. Dengan rincian jumlah DIM yang dinyatakan tetap sebanyak 101 DIM, yang bersifat redaksional

sebanyak 8 DIM bersifat substansi sebanyak 10 DIM, dan yang bersifat substansi baru sebanyak 2 DIM.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly mengungkapkan, MK merupakan penafsir tunggal dan penjaga konstitusi, dengan adanya revisi undang-undang tersebut diharapkan peran MK dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan. Tak lupa pula dia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.

“Kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” papar Yasonna di hadapan Rapat Paripurna. ■ eko/es

Parlemen Tak Kehilangan Semangat Kerja di Masa Pandemi Covid-19



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel. Foto: Oji/MAN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan

(Korinbang) Rachmat Gobel mengungkapkan bahwa di tengah berbagai keterbatasan pada masa pandemi ini, para Anggota Dewan tak kehilangan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR RI. Ia pun optimis semangat tersebut akan menghasilkan *output* yang baik bagi perkembangan bangsa dan negara.

“Rekan-rekan Anggota Dewan tidak kehilangan semangatnya dalam menjalankan fungsi dan tugas DPR. Mereka berupaya secara maksimal menjalankan perannya sebagai mitra kritis Pemerintah. Saya optimis, semangat dan keras ini akan berujung berupa hasil kerja besar untuk pembangunan bangsa ini ke depan,” ujar Gobel berkenaan dengan peringatan HUT ke-75 DPR RI, dalam rilisnya kepada *Parlementaria*, Sabtu (29/8).

Gobel pun bersyukur dari tahun ke tahun, dinamika demokrasi Indonesia menunjukkan keberadaan DPR RI sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat semakin kuat dalam keseimbangan pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Saat ini, Bangsa Indonesia mempunyai agenda besar. Tidak hanya terkait masalah pandemi Covid-19, tapi juga saat ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam rangka membangun masa depan perekonomian nasional. Seperti dilontarkan Presiden Joko Widodo, Indonesia harus menjadikan situasi sekarang ini sebagai momentum untuk melakukan lompatan besar.

“Dengan potensi sumber daya yang ada dan kondisi masyarakat yang kian dinamis, lompatan besar itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Bagi setiap Anggota DPR, hal ini harus dijadikan sebagai motivasi dalam menjalankan

fungsinya, menjadi pendorong untuk lebih berperan melakukan hal besar bagi masa depan bangsa,” tuturnya.

Politisi Partai NasDem ini juga berujar bahwa masyarakat konstituen sudah sangat mengharapkan dan tengah menunggu wakil-wakilnya di DPR RI berperan membangun kehidupan yang lebih baik bagi bangsa ini, baik di bidang sosial, ekonomi, teknologi dan kehidupan politik yang demokratis.

Gobel juga mengungkapkan, di bidang legislasi, setidaknya DPR sudah menyelesaikan dua tanggung jawab penting yaitu pertama, mengesahkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang merupakan *carry over* dari DPR periode 2014-2019. UU ini dinilai untuk mendorong peningkatan nilai tambah sektor pertambangan dan mewujudkan industri hulu dan hilir yang kuat.

Kedua, DPR telah merespon dengan cepat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghadapi dampak Covid-19 menjadi UU. “Ini sangat penting karena memberi ruang yang luas bagi eksekutif agar bisa merespon secara cepat berbagai kebijakan yang bersifat *extraordinary* yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya,” jelas Gobel.

Bersama Pemerintah, saat ini Anggota DPR juga tengah bekerja keras menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja. “RUU ini merupakan satu terobosan dan kerja besar untuk menjamin terjadinya penguatan fundamental ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju,” tutup Gobel. ■ hs/sf

Pimpinan DPR Apresiasi Langkah KSAD Terhadap Prajuritnya

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah tegas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa yang telah menindak dengan tegas dan memberikan sanksi berat kepada para prajurit TNI AD yang terlibat dalam kejadian pengrusakan serta pembakaran Polsek Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu (29/8) dini hari.

“Saya apresiasi sikap tegas dari Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD yang memberikan sanksi terberat, yaitu pemecatan kepada anak buahnya jika terbukti terlibat. Ini bukti bahwa beliau serius membenahi kesatuannya dan tidak mentolerir perilaku yang tidak tepat dan salah di bawah komandonya, dimana mekanismenya diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer,” kata Azis dalam siaran persnya kepada **Parlementaria**, Minggu (30/8).

Azis menyambut baik langkah Jenderal Andika yang siap memberikan bantuan perawatan bagi korban di RSPAD dan ganti rugi terhadap kerusakan yang terjadi. Menurutnya, inilah bukti bahwa Jenderal Andika sangat perhatian dan bertanggung jawab sebagai pemimpin. Azis meminta agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan harapan Jenderal Andika.

“KSAD sudah secara tegas mengatakan bahwa akan menjamin keselamatan masyarakat yang

memberikan informasi mengenai peristiwa itu, masyarakat jangan khawatir untuk memberikan informasi tersebut. Karena justru informasi-informasi tersebut sangat penting dalam menyusut para oknum yang terlibat,” tandas Azis.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap kejadian seperti di Polsek Ciracas tidak terulang di masa mendatang. Jangan sampai perilaku oknum personel TNI AD di tengah masyarakat menjadi hal yang menakutkan. Sebaliknya, para prajurit harus memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat. Pada akhirnya perilaku penyerang tidak merepresentasikan TNI AD secara umum.

“Jadikan peristiwa sebagai sebuah

evaluasi di internal TNI AD. Transparansi yang dilakukan KSAD Andika Perkasa adalah langkah positif bahwa yurisdiksi Peradilan Militer terbuka dan tidak memiliki kekebalan hukum terhadap para prajurit yang salah,” tutup legislator dapil Lampung II itu.

Adanya insiden di Polsek Ciracas, KSAD Jenderal Andika Perkasa mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah personel. “Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya. Daripada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab yang sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janji saat menjadi anggota TNI AD,” tegas Andika. ■ sf



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Jaka/MAN

DPR Pastikan Kawal Pembahasan RUU Ciptaker



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Jaka/MAN

DPR RI akan terus mengawal pasal demi pasal pembahasan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dengan mengundang serta menyerap aspirasi dari berbagai kalangan seperti Asosiasi Pengusaha, konfederasi buruh serta pihak terkait lainnya demi sempurnanya RUU Ciptaker.

“Kami juga sudah mengadakan rapat bersama konfederasi serikat pekerja dan sudah membuat tim perumus bersama serikat pekerja mengenai RUU Cipta Kerja ini,” jelas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan usai menerima APINDO dan KADIN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,

Jumat (28/8). Dasco mengatakan, tim perumus dari DPR RI ingin mendengar masukan dari jajaran APINDO dan KADIN, agar bisa menyelaraskan persepsi antara pengusaha dan konfederasi serikat pekerja.

Menurut Dasco, tanggapan dan masukan dari APINDO dan KADIN sangat positif mengenai RUU Ciptaker. Intinya ingin mencari solusi agar perselisihan dan persoalan buruh yang menjadi catatan konfederasi dapat diselesaikan. “Kita juga telah mendengar masukan dan diskusi dari APINDO dan KADIN, tentunya juga kami selaraskan dengan keluhan keluhan dari konfederasi serikat pekerja,” komitmen Dasco.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, beberapa masukan buruh terkait RUU Ciptaker yaitu mengenai ketenagakerjaan, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Pada prinsipnya, lanjutnya, sudah mulai ada titik temu satu sama lain mengenai masukan dari konfederasi buruh. “Ada beberapa yang sama dan ada juga yang mendekati kesamaan tinggal komunikasi antar pengusaha dan buruh saja ditingkatkan, di sisi lain ada DPR yang menjembatani titik temu tersebut,” terang Dasco.

Mengenai persoalan jaminan hari tua buruh, Dasco mengatakan, para pengusaha juga telah memikirkan dan membahas persoalan tersebut. “Asosiasi meminta DPR mencari terobosan dan titik temu terkait persoalan jaminan hari tua buruh, ini kita apresiasi masukan mereka dan para konfederasi buruh juga pasti setuju agar DPR menjembatani persoalan tersebut,” jelas legislator dapil Banten III itu.

Sebelumnya, DPR bersama 16 perwakilan serikat pekerja telah menghasilkan beberapa poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker. Kemudian dibentuk tim kerja bersama yang bertugas merumuskan masukan dari konfederasi buruh dan Panja Baleg DPR. Turut hadir dalam pertemuan dengan APINDO dan KADIN itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Nurdin. ■ ann/sf

DPR Bersama Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU PDP

Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke tingkat I atau Panitia Kerja (Panja). RUU ini diharapkan mampu menjamin kedaulatan data serta perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia.

“Sembilan Fraksi di DPR menyetujui untuk membahas RUU tentang PDP bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini dengan berbagai catatan sebagaimana yang telah disampaikan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Kominfo, Kemendagri dan Kemenkumham di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Kharis menyebutkan bahwa RUU PDP ditargetkan akan rampung pada November 2020. “Dari *timeline* pembahasan RUU PDP, diharapkan minggu kedua November 2020, RUU PDP ini akan bisa selesai menjadi UU, untuk itu kami mohon kesediaan para mitra Komisi I dari pemerintah,” ujar politisi F-PKS itu.

Sebelumnya, dalam pandangan Fraksi, Juru Bicara dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani mengatakan, RUU PDP ini telah menjadi kebutuhan masyarakat, mengingat kasus penyalahgunaan data pribadi mulai dari kebocoran, penipuan serta penjualan data pribadi dirasakan meningkat frekuensinya. Kendati demikian, pihaknya memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU ini antara lain, agar kewajiban dan tanggung jawab



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid didampingi para Wakil Ketua Komisi I DPR RI menerima pandangan Pemerintah terhadap RUU PDP dari Menkominfo Johnny G Plate. Foto: OJI/IMAN

pengelola data diatur dengan tegas.

“Kemudian perlunya penunjukan atau dibentuknya institusi guna memastikan efektivitas implementasi baik bagi individu, korporasi maupun badan publik, serta pengaturan yang tegas menyangkut jenis-jenis data baik data bersifat umum maupun spesifik. Fraksi Partai Golkar memandang perlunya sanksi tegas atas pelanggaran bagi semua pihak serta partisipasi masyarakat yang lebih luas,” jelas Christina dalam pandangannya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam pernyataannya mewakili Pemerintah mengatakan, RUU PDP merupakan wujud bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman publik dalam penggunaan berbagai *platform* aplikasi internet.

“Kebijakan negara-negara sahabat mensyaratkan agar memiliki

perlindungan terhadap data pribadi yang setara untuk pemrosesan data pribadi antar negara. Juga memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penguatan internet, termasuk salah satunya aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19,” jelas Johnny.

Johnny menambahkan, saat ini insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif, serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin yang semakin marak terjadi. “Itu semua makin memperkuat kebutuhan perlindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI,” tandas Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu. ■ **ann/sf**

Komisi II **Setujui** Pagu Anggaran Kemendagri Sebesar Rp 3,204 Triliun

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021 sebesar Rp 3,204 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,303 miliar.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa . Foto: Rumi/MAN

“Namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri dan DKPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya,” ucap Saan dalam memimpin rapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

”

MEMINTA KEMENDAGRI DAN DKPP MELAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengatakan, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp 1,275 triliun termasuk usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp 91,949 miliar dan mengamanatkan kepada Anggota Badan Anggaran (Banggar) di Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR RI.

“Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran BNPP tahun 2021 sebesar Rp 227 miliar. Namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR RI meminta BNPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI,” ungkap Saan.

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori sempat menjelaskan tentang arah kebijakan rencana program anggaran tahun 2021 Kemendagri. Dikatakannya, rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 mempunyai tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. ■ dep/sf





Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan para mitra kerja. Foto: OJI/MAN

Komisi III Terima Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Mitra Kerja Tahun 2019

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan para mitra kerja. Dalam rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (31/8), Komisi III DPR RI menerima penjelasan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2019, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester I & II Tahun Anggaran 2019.

“Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2019 oleh pengguna anggaran, serta tindak lanjut terhadap temuan BPK RI semester I dan II Tahun Anggaran 2019 untuk kemudian diserahkan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Desmond.

Dalam rapat ini seluruh mitra kerja Komisi III telah menyampaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019.

Adapun ke seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI antara lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

Kemudian, Sekretariat Mahkamah Agung RI, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Selain itu, Desmond yang memimpin rapat menyampaikan bahwa, Komisi III DPR RI akan meminta kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI untuk melakukan telaahan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran

2019-2020 seluruh mitra Komisi III DPR RI, dan hasil telaahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam persetujuan pagu definitif Tahun Anggaran 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, selama ini laporan pertanggungjawaban APBN tidak pernah memasukkan rekomendasi DPR RI. Dia pun mengusulkan agar rekomendasi DPR menjadi perhatian penting dalam APBN. Sehingga pagu definitif 2021 akan tergantung pada hasil telaahan atau rekomendasi DPR, ini akan menjadi perhatian mitra kerja Komisi III, bagaimana menjalankan anggaran secara kualitatif.

“Kami sudah sepakat tadi dengan Panja Pemerintah. Jadi tidak hanya spesifik di PNBPN, semua penggunaan anggaran menjadi landasan, rekomendasi DPR lebih tinggi ketimbang analisis dari BPK,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu saat pendalaman. ■ eko/es

DPR Ajak Masyarakat **Cintai Produk dalam Negeri**

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet Ariyadi mengajak masyarakat untuk memupuk jiwa optimisme dan nasionalisme dengan lebih mencintai produk dalam negeri, khususnya sektor pertanian. Mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan sumber daya alam melimpah dan potensi hasil tani yang baik untuk masyarakat.

“Sangat signifikan dan fundamental kita lakukan saat ini memupuk rasa optimisme,

nasionalisme, patriotisme dan harus lebih mencintai produk dalam negeri termasuk produk pertanian. Sebab, harus kita sadari bawa negeri ini dikenal sebagai negara agraris dan sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Slamet saat diwawancarai *Parlementaria* terkait HUT ke-75 DPR RI, Selasa (1/8).

Politisi PAN ini juga mengungkapkan bahwa membanjirnya produk pertanian dari luar harus disikapi secara

”

HARUS KITA SADARI BAWA NEGERI INI DIKENAL SEBAGAI NEGARA AGRARIS DAN SEKTOR PERTANIAN MENJADI PENYUMBANG TERTINGGI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

serius dan bijak, termasuk liberalisasi sektor pertanian. Sikap Indonesia harus tegas untuk menjaga ketahanan pangan agar Indonesia bisa berdikari dalam bidang pertanian terutama di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan demikian saya yakin dan optimis mimpi-mimpi kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni bersatu, berdaulat, adil, dan makmur akan menjadi kenyataan,” tegas Slamet. Politisi asal Madura ini pun juga akan terus melakukan pengawalan terhadap produksi tani Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian yang ia terus dorong agar mampu menciptakan kedaulatan pangan yang berdikari. ■ hs/sf



Anggota Komisi IV DPR RI Slamet Ariyadi. Foto: Andri/MAN

Komisi V Dorong PUPR Tuntaskan Program Jalan Nasional

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menuntaskan berbagai program jalan nasional di Indonesia, secara khusus yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terutama, menurut Aras, jalur Bone-Maros dengan ruas jalan sepanjang 53 kilometer yang sampai hari ini belum pernah terdapat pembenahan.

Terlebih, ungkap Aras, jalur tersebut juga diketahui telah diambil alih penanganannya oleh Balai Besar yang ada di Sulsel. Demikian dipaparkan Aras dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9). Rapat digelar secara pertemuan fisik dan *virtual*.

“Saya berharap, jalan nasional yang menjadi domain Kementerian PUPR bisa diselesaikan secepatnya.

Terutama, jalur Bone-Maros yang sudah berulang kali saya sampaikan itu ada ruas jalan kurang lebih 53 kilometer sampai hari ini belum pernah dilakukan pembenahan. Saya mohon perhatiannya, sehingga ini tidak terkesan terbengkalai oleh karena sudah diambil alih penanganannya oleh Balai Besar di Sulsel,” ujar Aras.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut menyoroti kemacetan yang terjadi dari jalur Makassar ke daerah Maros yang dinilai sudah terlampaui *crowded*. Sehingga, Aras mengusulkan kepada Menteri PUPR agar lebih sigap meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan dengan adanya solusi pembuatan tol untuk menyambung dari Tol Ir. Sutami dari Makassar ke Maros.

Di sisi lain, berkaitan dengan pembahasan mengenai kereta api, Aras menekankan kepada

Kemenhub agar memprioritaskan penyelesaian pembangunan jalur kereta api, khususnya di Sulsel.

“Sehingga, dalam kurun waktu dua tahun ke depan Insya Allah kereta api bisa beroperasi di Sulawesi Selatan. Mengingat, sudah kurang lebih tiga atau empat tahun gerbong disana sudah lama tidak berjalan. Sehingga, saya imbau permasalahan tersebut bisa segera dituntaskan,” pungkas legislator dapil Sulsel ii itu. ■ pun/sf

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras. Foto: Runi/MAN



”

SAYA MOHON PERHATIANNYA, SEHINGGA INI TIDAK TERKESAN TERBENGKALAI OLEH KARENA SUDAH DIAMBIL ALIH PENANGANNYA OLEH BALAI BESAR DI SULSEL

Titikberatkan Industri Pangan dalam Penyelamatan Ekonomi Jangka Pendek



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Azka/MAN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menjelaskan bahwa dalam jangka waktu pendek, fokus Pemerintah terhadap upaya penyelamatan ekonomi nasional harus dititikberatkan pada industri pangan. Sebab menurutnya ada perubahan pola pikir masyarakat dalam membelanjakan uangnya yang disebabkan terjadinya pandemi.

Hal tersebut disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini ketika memimpin diskusi antara Komisi VI DPR RI dengan para pakar ekonomi membahas upaya penyelamatan ekonomi negara dari dampak pandemi dan resesi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin

(31/8). Ia menambahkan bahwa pandemi telah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, hingga akhirnya melemahkan daya beli.

“Sehingga dengan APBN yang ada mungkin *recovery* di 2021 kita harus fokuskan pada industri pangan, dan sedikit ke sandang. Anggaran yang ada saat ini hanya untuk stok kesehatan. Nah saya pikir daya beli jatuh, daya beli surut, karena pendapatan masyarakat menurun. Industri juga 30 persen dari sandang, pangan, dan papan yang kira-kira masih bisa laku,” analisa Aria Bima.

Ia mengatakan, saat ini Komisi VI DPR RI masih mencari formula terbaik mengenai asupan yang harus dilakukan Pemerintah untuk aksentuasi dalam

”

TAPI DALAM WAKTU JANGKA DEKAT INI SELAIN INSTRUMEN BUMN KITA MANFAATKAN, PRIVAT, SAMA KOPERASI YANG JADI *LEADING SECTOR* KITA

upaya *recovery* jangka pendek. Ia menambahkan *roadmap* tersebut harus mampu mengikuti kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang struktur pola pikirnya berubah menjadi bagaimana memenuhi kebutuhan harian dengan pangan.

“*Feeding* yang paling harus dilakukan Pemerintah untuk aksentuasi dalam *recovery* jangka dekat ini sedang kita pikirkan *roadmap*-nya, karena harus mengikuti kemampuan daya beli masyarakat yang tadi kita bahas, bahwa struktur pasarnya berubah jadi soal makan, soal sandang, soal kesehatan. Nah ini yang menurut saya ini penting supaya ada kebijakan-kebijakan khusus ke situ,” jelas Aria lebih lanjut.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V itu berharap ada *roadmap* kedua yang segera diselesaikan Pemerintah sampai pada pertengahan tahun 2021. “Tapi dalam waktu jangka dekat ini selain instrumen BUMN kita manfaatkan, privat, sama koperasi yang jadi *leading sector* kita. Ini yang saya tanyakan, supaya ada penyelamatan ekonomi nasional dari risiko resesi,” tutup Aria. ■ *er/sf*

Komisi VII Pertanyakan Berkurangnya Volume LPG Bersubsidi

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud mempertanyakan berkurangnya volume LPG Tabung 3 kg Bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam nota keuangan dan disampaikan Pemerintah sebelumnya. Pasalnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 29 Juni 2020 lalu telah disepakati bahwa volume LPG 3 kg untuk TA 2021 sekitar 7,5-7,8 juta Metrik Ton (MT).

"Kita (Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM, **red**), serta Badan Anggaran telah sepakat batas minimum LPG 3 kg subsidi adalah 7,5 Juta MT, dan batas maksimum 7,8 juta MT. Ternyata di asumsi dasar makro (RAPBN 2021) yang keluar malah kembali ke angka 7 juta MT. Ini yang membuat pertanyaan kami," ujar Rudy di sela-sela Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh kegiatan masyarakat menggunakan LPG bersubsidi. Sedangkan penggunaan LPG non-subsidi yang notabene seperti yang dilakukan oleh berbagai restoran selama ini, dengan adanya pandemi ini relatif berkurang. Sehingga, analisa Rudy, bisa dipastikan masyarakat akan lebih memilih menggunakan LPG yang bersubsidi.

"Angka lima ratus ribu (rupiah) sejatinya angka yang tidak terlalu signifikan. Namun dampaknya pasti sangat berarti dan bermanfaat bagi



Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud. Foto: Azka/MAN

”

DAMPAKNYA PASTI SANGAT BERARTI DAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT INDONESIA. KAMI AKAN MAKSIMALKAN PERJUANGAN KAMI UNTUK MENINGKATKAN KEMBALI VOLUME LPG BERSUBSIDI INI

masyarakat Indonesia. Kami akan maksimalkan perjuangan kami untuk meningkatkan kembali volume LPG bersubsidi ini," tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Rudy menjelaskan, bahwa peningkatan volume LPG bersubsidi ini sangat penting dibanding subsidi bagi Peralite. Mengingat Peralite ini lebih bernilai keekonomisannya, sehingga tidak boleh menggunakan APBN. Dengan demikian Peralite tidak boleh disubsidi. Oleh karena itu ia berharap agar subsidi Peralite dialihkan untuk subsidi LPG 3 kg. "Ini permintaan rakyat Indonesia. Sehingga wajib direalisasikan," tegas legislator dapil Kalimantan Timur itu. ■ **ayu/sf**

Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi VIII **Setujui** Tambahan Anggaran KPPPA

Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI tahun 2021 sebesar Rp 156,5 miliar untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Rp 11 miliar untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kesejahteraan perempuan dan anak-anak merupakan hal wajib yang harus terus dijaga, untuk itu setiap program yang diusulkan oleh KPPPA harus didukung sepenuhnya oleh Komisi VIII DPR RI.

“Kita dukung penuh usulan dari Bu Menteri (PPPA) ini karena perempuan dan anak-anak itu kesejahteraannya wajib dijaga, apalagi program yang disampaikan itu untuk masa depan,” papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga beserta jajaran KPPPA di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Ihsan menambahkan, Komisi VIII DPR RI mendukung realokasi anggaran KPPPA sebesar Rp 4,5 milliar sebagai dukungan program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Legislator daerah pemilihan (dapil) Jambi itu berharap penambahan anggaran tersebut dapat membuat KPPPA menjadi lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugas dan membuat rencana program masa depan yang lebih baik.

”

KITA DUKUNG PENUH USULAN DARI BU MENTERI (PPPA) INI KARENA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK ITU KESEJAHTERAANNYA WAJIB DIJAGA, APALAGI PROGRAM YANG DISAMPAIKAN ITU UNTUK MASA DEPAN

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus . Foto: OJUMAN

“Realokasi anggaran dan penambahan anggaran ini harus disertai dengan *input* dan *output* yang jelas, Bu Menteri (PPPA) harus lebih semangat lagi dalam bekerja untuk kesejahteraan perempuan dan anak-anak,” pesan politisi PDI-Perjuangan ini sembari menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan mengupayakan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2021. ■ tn/sf



Komisi IX dan Pemerintah Komitmen Kembangkan Vaksin Covid-19



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berdiskusi dengan Menteri BUMN. Foto: Jaka/MAN

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, Komisi IX DPR RI berkomitmen bersama Pemerintah, kalangan kampus (akademisi) dan semua pihak untuk mengembangkan vaksin, obat dan peralatan kesehatan yang diproduksi di dalam negeri untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

“Dalam rangka membangun kemandirian obat, vaksin dan alat

kesehatan dalam negeri, Komisi IX DPR mengapresiasi dan mendukung penuh keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang telah melakukan riset dan inovasi untuk penanggulangan Covid-19, termasuk pengembangan Vaksin Merah Putih yang menggunakan isolate virus asli di Indonesia,” kata Melki dalam siaran persnya, Selasa (1/9).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya juga mendorong Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk meningkatkan

komunikasi, koordinasi, sinergi dalam kebijakan dan implementasi riset serta inovasi dalam negeri bersama seluruh pihak terkait yang berkontribusi aktif.

“Dengan tetap mengutamakan kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas serta keberpihakan kepada keamanan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya. Ia meminta Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk menyusun *grand design* riset dan inovasi pengembangan kemandirian obat, vaksin dan alat kesehatan dalam negeri secara terencana dan terukur. Termasuk kerangka waktu (timeline) dan infrastruktur distribusi vaksin, dan untuk segera diserahkan ke Komisi IX DPR RI.

Legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu melanjutkan, Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenkes RI untuk berkomitmen memanfaatkan hasil riset dan inovasi Covid-19 yang telah dikembangkan di Indonesia dengan berpedoman kepada instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Terakhir, Komisi IX DPR RI juga mendesak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) RI untuk lebih proaktif melakukan upaya pendampingan penelitian dan pengembangan obat dan vaksin yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan situasi pandemi. ■ rnm/sf

Isu Lingkungan Belum Diterapkan dalam Promosi Pariwisata

Isu lingkungan ternyata belum diterapkan dalam promosi pariwisata nasional. Padahal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan, upaya ini penting di masa pemulihan pariwisata. Selama ini, kampanye Pemerintah hanya pada protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

“Dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021, (Pemerintah) belum memasukkan (isu) lingkungan, sehingga mestinya menjadi kebersihan, keamanan, dan lingkungan,” ungkap Agustina saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti . Foto: Runi/MAN

”

SEMANGAT LINGKUNGAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL DI DESTINASI WISATA BELUM DIKOMUNIKASIKAN SECARA BAIK DI INTERNAL PEMERINTAH

Wishnutama Kusubandio beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, semangat lingkungan dalam penerapan protokol di destinasi wisata belum dikomunikasikan secara baik di internal Pemerintah. Padahal, substansi ini sering disampaikan Komisi X dalam rapat dengan Kemenparekraf. “Kami mengingatkan kembali bahwa Kemenparekraf dalam pembahasan

RKA K/L tahun 2021 harus memperhatikan rekomendasi Panja Pemulihan Pariwisata,” harapnya.

Sementara itu pada bagian lain, Agustina menyinggung juga arah kebijakan pariwisata Indonesia yang meliputi pemulihan pariwisata melalui pengembangan destinasi super prioritas, pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas), serta peningkatan 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta). ■ mh/sf

Tetapkan Asumsi Makro 2021, Pemerintah Harus Kedepankan Prinsip Kehati-hatian

Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk membahas asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Negara (RAPBN) Tahun 2021. Menanggapi asumsi makro yang disampaikan Pemerintah, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Prasetyo mengingatkan Pemerintah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian namun dengan tanpa mengurangi optimisme yang diciptakan. Menurutnya, dalam merumuskan asumsi dasar dalam kondisi ketidakpastian diperlukan kesamaan cara pandang pemerintah dalam menangani sektor keuangan.

Untuk itu, Andreas menilai Komisi XI DPR RI bisa mengambil kebijakan yang luar biasa untuk bisa menetapkan asumsi makro yang sesuai dengan situasi krisis seperti saat ini. Hal

tersebut ia ungkapkan saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, yang seluruhnya hadir secara fisik di Ruang KK I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

“Pandemi Covid-19 ini tidak hanya menimbulkan resesi mau pun depresi, melainkan sebuah kelumpuhan atau *paralysis*, yaitu suatu sistem yang tiba-tiba beku. Artinya, buat kita belum punya pengalaman yang sama dengan apa yang pernah kita hadapi. Agar bisa kembali ke suatu yang berjalan normal dibutuhkan waktu yang panjang. Cara keluar pun tidak mudah karena butuh penyesuaian besar-besaran di segala sektor. Maka kita, Komisi XI bisa mendapat asumsi makro berdasarkan

angka-angka yang memang susah untuk perdebatkan, tetapi yang bisa kita tetapkan nanti adalah ujungnya,” kata politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Langkah penting yang perlu ditempuh Pemerintah, menurut Andreas, yang pertama adalah pengendalian defisit. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi yang turun akan berdampak pada turunnya penerimaan negara dan berpengaruh pada belanja negara. Jika pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, penerimaan negara turun dari rencana yang diberikan, maka tentu belanja negara perlu disesuaikan. Intinya, Andreas mengatakan defisitlah yang perlu dikendalikan, sehingga kualitas perencanaan belanja masih sangat penting ditentukan.

Catatan berikutnya, legislator dapil Jawa Timur V itu menilai penting bagi Pemerintah untuk menciptakan permintaan. Menurutnya, dalam situasi sekarang ini salah satu yang diharapkan adalah percepatan belanja Pemerintah. Menurutnya, strategi percepatan anggaran dan penguatan kapasitas K/L maupun daerah sangat ditunggu untuk berjalan dengan memberikan gambaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara jelas.

“Bagaimana sejak awal ini bisa dilakukan, jangan seperti sekarang ini baru menyusun DIPA-nya. Ini kan sangat mendukung masalah menciptakan permintaan. Karena, kalau kita misalnya terlalu memaksa sektor keuangan maka perlu kehati-hatian karena sifatnya hanya mendorong permintaan tapi tidak menciptakan permintaan. Karena nanti kalau terlalu dipaksakan malah ujungnya menimbulkan masalah di kemudian hari,” imbuhnya. ■ alw/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief/MAN

BKSAP Serahkan Masker dari Parlemen Vietnam ke RSCM



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat memimpin penyerahan alat kesehatan dari Parlemen Vietnam berupa masker, di RSCM, Jakarta Pusat. Foto: Puntho/MAN

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyerahkan alat kesehatan berupa masker yang merupakan amanah pemberian dari Parlemen Vietnam sebagai simbol jalinan persahabatan dengan Parlemen Indonesia. Fadli berharap, masker tersebut dapat bermanfaat untuk segenap masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai.

Hal tersebut disampaikan Fadli saat memimpin penyerahan alat kesehatan dari Parlemen Vietnam berupa masker, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Selasa (1/9). Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali

Sera dan Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Lies Dina Liastuti.

“Kami atas nama BKSAP menyampaikan amanah dari Parlemen Vietnam sebagai simbol persahabatan dengan Parlemen Indonesia berupa alat kesehatan masker yang disampaikan kepada BKSAP. Mudah-mudahan, masker ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang belum selesai,” ujar Fadli.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyatakan, penyerahan masker dari Parlemen Vietnam yang disampaikan oleh BKSAP DPR RI itu juga merupakan bagian dari bentuk gotong-royong seluruh negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hal itu, ungkap Fadli, dapat dilihat berdasarkan banyaknya upaya yang

telah dilakukan oleh segenap Anggota DPR RI terutama di daerah pemilihan masing-masing. Dimana, masing-masing Anggota Dewan telah melakukan berbagai penanganan dampak dari pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sektor ekonomi.

“Sembari, kampanye untuk menghadapi pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker serta menghindari kerumunan-kerumunan besar harus terus ditaati. Lebih bagus, kita terlalu waspada daripada tidak waspada sama sekali. Sebab, jika kita tidak mengatasi pandemi Covid-19 ini, maka sulit untuk kita mengatasi persoalan ekonomi,” pungkas Fadli. ■ pun/sf

DPR Minta Pemerintah Fokus Siapkan Diri Hadapi Segala Kemungkinan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menyampaikan, penyebaran pandemi Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri akan kondisi ketidakpastian program. Said mengatakan, dalam menghadapi pandemi Covid-19, Bangsa Indonesia harus tetap fokus mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi pada tahun 2021.

“Salah satu persiapan yang harus kita miliki adalah mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara efektif, inovatif dan produktif. Kami mengapresiasi langkah Pemerintah

untuk tetap melanjutkan akselerasi program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dimulai pada tahun 2020 ini,” ucap Said saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Gubernur Bank Indonesia, terkait pembicaraan Tingkat I/Pembicaraan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Di sisi lain, sambung politisi PDI-Perjuangan itu, Pemerintah juga tetap perlu berhati-hati dan konsisten terhadap defisit anggaran dengan memanfaatkan sumber-sumber

pembiayaan yang aman, *prudent*, dikelola secara berkelanjutan agar rasio utang tetap terjaga dalam batas aman. Sehingga, menurut Said, risiko biaya yang harus ditanggung Pemerintah ketika mengambil kebijakan lebih kecil dan rasional.

“Sebagai konsekuensi dari besarnya kebutuhan keekonomian tahun 2020 – 2021 serta upaya penguatan pondasi perekonomian maka kebijakan makro fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif, yang terarah, terukur, dengan tetap menjaga agar defisit anggaran mencukupi kebutuhan pemulihan ekonomi,” ujar Said.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan mengenai RAPBN 2021 seperti yang telah disampaikan oleh Presiden. Terkait perkembangan perekonomian terkini, yang menjadi basis bagi Pemerintah yaitu melakukan proyeksi tahun 2021 dan pokok-pokok RAPBN 2021.

“Mengenai kondisi perekonomian terkini, kita semua memahami bahwa kondisi perekonomian saat ini, baik global maupun nasional, sangat dipengaruhi oleh perkembangan Covid-19. Hingga hari ini jumlah total kasus di seluruh dunia mencapai 25,3 juta kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 850 ribu orang. Kita terus berupaya, di seluruh dunia agar perkembangan ini tidak makin tereskalasi namun kita bisa mencapai perkembangan yang mendarat atau bahkan menurun. Tekanan Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam di berbagai negara,” pungkas Menkeu Sri Mulyani. ■ dep/es



Ketua Badan Anggaran DPR RI MH. Said Abdullah. Foto: Azka/MAN

Ketimpangan Distribusi Subsidi Energi Harus Diselesaikan Bersama



Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan. Foto: Hendra/MAN

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menuturkan bahwa distribusi subsidi energi harus menjadi perhatian banyak pihak, pasalnya seringkali ditemukan proses distribusinya tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat mampu yang justru lebih banyak menikmati subsidi energi gas tabung 3 kg. Marwan pun mengakui kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan.

“Pada titik ini, subsidi diperuntukkan untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau *market imperfectionist*. Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin agar tetap

memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial,” papar Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat dalam rangka pengawasan terhadap penelaahan distribusi subsidi energi, Kamis (27/8).

Politisi Partai Demokrat ini pun menegaskan, pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya. Meskipun di satu sisi, subsidi dipandang sebagai bantuan sosial (*social spending*), kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif. “Dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin,” tegas legislator dapil Lampung II itu.

Menurut Marwan, ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama. “Perlu adanya penelaahan secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait subsidi energi, mulai dari Pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, Badan Usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan Kelompok Masyarakat sebagai konsumen/ pengguna subsidi energi. Konsumen/ pengguna merupakan masyarakat yang menurut undang-undang berhak dan layak menerima serta menikmati subsidi energi yang disediakan oleh pemerintah,” tutur Marwan.

Diketahui, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari 5 kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp 400 triliun atau sekitar 30 persen dari total APBN tahun 2014.

Tercatat subsidi energi dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp 125,3 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 137,5 triliun. Secara rinci, subsidi BBM dan LPG turun Rp 4,7 triliun menjadi Rp 70,6 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 75,3 triliun. Subsidi listrik dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp 54,8 triliun, turun Rp 7,4 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 62,2 triliun. ■ hs/sf

Sekjen DPR Lantik Pejabat Struktural Kesetjenenan

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar kembali melantik beberapa jabatan struktural dan jabatan fungsional untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Kesetjenenan DPR RI. Pegawai-pegawai yang dilantik terdiri dari 33 jabatan struktural dan 50 jabatan fungsional. Ia mengatakan kekosongan jabatan tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas pension dan promosi jabatan.

Dalam wawancara dengan **Parlementaria** usai pelantikan di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9), Indra berharap pelantikan ini dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI dalam fungsi sebagai *supporting system* Anggota Dewan. Untuk itu ia juga berpesan agar para pegawai yang dilantik tetap amanah dalam menjalankan tugas.

“Tentu saya sampaikan bahwa pelantikan harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga saya berharap di semua lini sekali lagi tidak melakukan *business as usual*. Lakukanlah terobosan-terobosan inovasi, lakukanlah hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja sesuai lini yang ada,” terang Indra.

Indra pun mengingatkan, kinerja pegawai akan terus dievaluasi, sehingga ia mendorong para pegawai yang dilantik terus bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi jabatannya. Ditambahkannya bahwa dalam waktu dekat ini Setjen dan Badan Keahlian DPR RI akan melakukan *assessment* terhadap kinerja masing-masing pegawai.

Adapun pejabat-pejabat



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat melantik pejabat struktural dan jabatan fungsional. Foto: Runi/MAN



LAKUKANLAH TEROBOSAN-TEROBOSAN INOVASI, LAKUKANLAH HAL-HAL YANG BISA MENINGKATKAN KINERJA SESUAI LINI YANG ADA

struktural yang dilantik diantaranya Sartomo (Kepala Bagian Sekretarian Komisi I), Mardi Harjo (Kepala Bagian Persuratan dan Penyimpanan), Dewi Pusporini (Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), Djoko Hanggoro (Kepala Bagian Penerbitan), Juhartono

(Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi), Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV), dr. Dian Handayani (Dokter Madya), dan Endang Dwi Astuti (Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral).

Selanjutnya, Heny Widyaningsih (Kepala Bagian Kepegawaian), Budi Wuryanto (Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat), Pesta Evaria Simbolon (Kepala Bidang Evaluasi Diklat), dr. Dian Mardiyani (Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan), Siti Atika (Kepala Bagian Perencanaan), Insan Abdirrohman (Kepala Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota), Dian Arivani (Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan), dan M. Najib Ibrahim (Kepala Bagian Musyawarah Pimpinan). ■ er/sf

RS Santosa Bandung Berikan Pelayanan Paripurna pada Peserta Jamkestama

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso mengapresiasi Rumah Sakit (RS) Santosa Bandung yang dinilainya bisa memberi pelayanan paripurna kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya.

Demikian dikatakan Agung usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan pihak PT. Jasindo serta RS Santosa di Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/9). Agung menyampaikan bahwa RS Santosa merupakan rumah sakit swasta yang terakreditasi A dan sudah lolos dalam sertifikasi Amerika Serikat.

“Kalau kita lihat RS Santosa ini sudah luar biasa. Sebagai rumah

sakit swasta satu-satunya yang terakreditasi A, dan juga lolos dalam sertifikasi Amerika. Ini luar biasa untuk rumah sakit swasta, kalau yang tidak swasta (RS Pemerintah) sudah cukup banyak. Inilah yg menjadi poin dari RS Santosa ini. Artinya bahwa, RS ini sudah bisa memberikan pelayanan paripurna untuk para Anggota DPR dan keluarganya,” ungkap Agung.

Agung menambahkan, Jasindo yang menetapkan RS Santosa sebagai mitra kerjanya sudah sangat tepat. Dari paparan yang disampaikan pihak RS Santosa, lanjut Agung, pelayanan unggulan seperti *eye center*, akupuntur, kanker, jantung dan syaraf, radiologi, laboratorium serta inovasi-inovasi lainnya sudah sangat luar biasa.

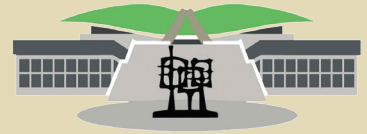
Di sisi lain, politisi Partai Demokrat

ini menyampaikan, untuk mencegah penyebaran Covid-19, BURT DPR RI sudah mengusulkan kepada Jasindo melalui Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melakukan *swab test* secara rutin bagi 575 Anggota DPR RI sebelum masuk masa sidang. Mengingat, hingga hari ini tren penyebaran Covid-19 belum menunjukkan penurunan.

“Jadi saat reses kita pulang ke daerah, setelah itu *swab* dulu, setelah itu baru boleh mengikuti sidang-sidang yang ada di DPR. Jadi bukan berarti kita terus diam di rumah, tidak melakukan kegiatan apapun itu juga salah, tapi bagaimana kita harus bisa menyikapi pandemi ini dengan lebih bijak dengan lebih hati-hati dan waspada,” tandas Anggota Komisi II DPR RI itu. ■ es



Ketua BURT Agung Budi Santoso bertukar cenderamata usai pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan manajemen RS Santosa di Bandung. Foto: Erman/MAN



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memandu pelantikan Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Parta Gerindra, Prasetyo Hadi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9). Foto: Tim Fotografer/MAN



Ketua Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Rusia H.E. Lyudmila Georgievna guna membahas kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan antar parlemen, di Jakarta, Senin (31/8). Foto: Abu/MAN



Perpustakaan DPR RI mengadakan Bibliobattle #3 yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-75 DPR RI dan Hari Kemerdekaan RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8). Acara itu turut menghadirkan Anggota DPR RI Dyah Roro Esti, Puteri Anetta Komarudin, dan Farah Puteri Nahlia. Foto: Runi/MAN

